

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku :

- A.P. Parlindungan, 1996, *Komentar UUHT dan Sejarah Berlakunya*, Bandung: Mandar Maju.
- Arie Sukanti Hutagalung dan Markus Gunawan, 2009, *Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Asikin Zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Rajawali Press.
- Bambang Sunggono, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Bambang Sunggono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Cetakan keempat, Jakarta : Sinar Grafika.
- Bernard Arief Sidharta, 2017, *Ilmu Hukum Indonesia*, Bandung : Unpar.
- Boedi Harsono, 2013, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Universitas Trisakti, Jakarta.
- Elisabeth Nurhaini Butarbutar, 2018, *Metode Penelitian Hukum, Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*, Cetakan kesatu, Bandung : PT. Refika Aditama.
- Hengki Andora, 2021, *Penguasaan Dan Pengelolaan Tanah Pemerintah : Konsep dan Dialektika dalam Sistem Hukum Indonesia*, Cetakan kesatu, Depok : Rajawali Pers.
- M. Arba, *Hukum Tata Ruang Dan Tata Guna Tanah : Prinsip-Prinsip Hukum Perencanaan Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Maria S.W. Sumardjono, 2005, *Kebijakan Pertanahan : Antara Regulasi dan Implementasi*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- Margono, 1997, *Metode Penelitian Pendidikan*, Jakarta : Rineka Cipta.

Mochtar Kusumaadmaja dan B. Arif Sidarta, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni.

Muchtar Wahid, 2008, *Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah*, Jakarta: Republika.

Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Mataram : University Press.

Muhammad Bakri, 2011, *Hak Menguasai Tanah Oleh Negara (Paradigma Baru Untuk Reforma Agraria)*, Malang, Universitas Brawijaya.

Noorsyamsa Djumara, 2007, *Prinsip-Prinsip Manajemen Aset/Barang Milik Daerah*, Jakarta : Lembaga Dalam Negeri dan Lembaga Administrasi Negara.

Rusmadi Murad, 1997, *Administrasi Pertanahan Pelaksanaannya Dalam Praktek*, Bandung : CV. Mandar Maju.

Salim HS, 2010, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sudikno Mertokusumo, 1998, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta Liberty.

Supriadi, 2018, *Hukum Agraria*, Jakarta: Sinar Grafika

Urip Santoso, 2010, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Jakarta , Kencana Media Group.

Urip Santoso, 2017, *Hukum Agraria : Kajian Komprehensif*, Jakarta, Kencana Media Grup.

Winahyu Erwiningsih, 2009, *Hak Menguasai Negara Atas Tanah*, Yogyakarta: Total Media.

B. Peraturan perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah,

C. Jurnal :

Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004*, FH UII Press.

D. Website :

<http://repo.jayabaya.ac.id;>

[http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/;](http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/)

[https://pu.go.id/;](https://pu.go.id/)

<https://e-journal.uajy.ac.id/>

<http://eprints.stialanmakassar.ac.id/>

<https://idtesis.com/>

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

<https://www.academia.edu/>

<https://repository.uinsuska.ac.id/>

<https://haloedukasi.com/barang-publik>

<https://notarynews.id>

<https://www.hukum-hukum.com>

<https://www.hukum-hukum.com>

<http://scholar.unand.ac.id>

<https://wislah.com/>

